



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUCI PARAMITASARI SYAHLANI
2. Jabatan : KEPALA DEPARTEMEN SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN
3. NHK : 864150

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 27.022.250.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 7.710 m²/400 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 11.565.000.000
2. Tanah Seluas 4.200 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 6.300.000.000
3. Tanah Seluas 549 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.921.500.000
4. Tanah Seluas 306 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 918.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 6.316 m²/200 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 6.316.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m²/180 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 140.250.000

1. MOBIL, DODGE T33 / PICK UP Tahun 1954, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOBIL, MAZDA 21.5L HB R A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
3. MOBIL, CHEVROLET LUV MOBIL BEBAN/KBD 25 195CC Tahun 1978, HASIL SENDIRI Rp. 22.500.000



4. MOTOR, SUZUKI UD 100 EE Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.		
2.750.000		
5. MOTOR, YAMAHA BKU A/T FREEGO Tahun 2024, HASIL		
SENDIRI Rp. 20.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	95.700.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	27.258.200.000
III. HUTANG	Rp.	541.944.444
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	26.716.255.556

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.